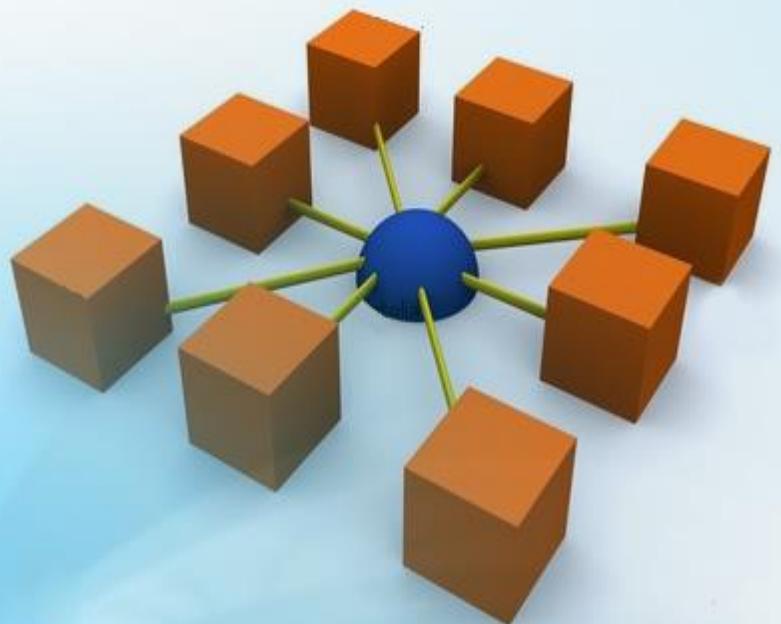




PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
Tahun Anggaran 2018**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME karena dengan bimbingan dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat terselesaikan dengan baik dan lengkap. Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam laporan ini, disajikan pencapaian sasaran kinerja dalam kurun waktu 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018 dengan fokus pada program-program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini juga dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga LKjIP ini dapat bermanfaat bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju VISI “*Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas*” serta MISI “*Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel*”.

Kuala Tungkal,

2019

KEPALA BPKAD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARATDrs. RAJIUN SITOANG, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19611120 199203 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kabupaten Tahun Tanjung Jabung Barat 2019 ini merupakan laporan yang disusun sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan VISI dan MISI organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini diharapkan hasil kinerja BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung barat dapat terlihat dengan jelas sehingga usaha pencapaian VISI dan MISI lembaga lebih terarah dan terstruktur.

Penyusunan LKjIP disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan VISI yakni "*Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermaktabat dan Berkualitas* .dengan strategi Mengembangkan system pengelolaan keuangan berbasis online [e-budgeting] Hal ini dilakukan untuk memberi kontribusi pencapaian VISI pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara sinergis bersama dengan instansi lainnya. Dengan ditopang oleh susunan organisasi BPKAD Kabupaten tanjung Jabung Barat sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 68, maka organisasi menjabarkan VISI-nya , tujuan, sasaran, kebijakan hingga bagian terkecil dalam bentuk beberapa program dan kegiatan.

Program yang dilaksanakan Tahun 2018 ini adalah : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebanyak 11 (sebelas) kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebanyak 4 (empat) kegiatan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebanyak 1 (satu) kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebanyak 1 (satu) kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebanyak 1 (satu) kegiatan, dan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan.

Secara ringkas dapat dijabarkan sasaran strategis yang diinginkan pada BPKAD Tanjung Jabung Barat melalui berbagai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas yang meliputi :

- a. Sasaran strategis program utama :
“Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.”
- b. Sasaran program-program penunjang :
 1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD.
 2. Kelancaran Pelayanan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
 3. Tersusunnya Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Tepat Waktu
 4. Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat.

Dari 6 (enam) Program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan yang dijalankan, dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan rumusan penilaian yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPKAD Kab. Tanjung Jabung Barat TA. 2018 dengan mengacu pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan dalam format yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan hasil nilai Baik/Berhasil dari sasaran strategis utama yang dilakukan.

Berdasarkan analisis kinerja, sebanyak 6 (enam) program berhasil dengan dengan katergori baik. Adapun dari segi analisis keuangan, besarnya dana yang dapat dimanfaatkan (total pagu) adalah Rp. 10.989.136.273,- sedangkan realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 10.273.508.942,- atau rata-rata 93,49% dengan realisasi fisik rata-rata sebesar 96,21% yang berarti anggaran dana terserap secara optimal.

Dengan segala usaha yang dilakukan melalui kerjasama seluruh staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Tanjung Jabung Barat, telah melakukan koordinasi yang intensif dengan seluruh bidang di instansi kerja. yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama internal dan semangat bekerja yang lebih kooperatif di lingkungan BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga nantinya dapat meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah menuju e-Government dan e-Budgeting.

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB. I. PENDAHULUAN	
1.1. Data Umum Organisasi.....	1
1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	6
1.3. Isu Strategis.....	9
BAB. II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja	12
2.2. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2. Realisasi Anggaran	30
BAB. IV. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Saran.....	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1.1. PNS pada BPKAD berdasarkan Golongan.....	7
Tabel 1.2. PNS pada BPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin	7
Gambar 2.1. Dokumen SAKIP.....	12
Tabel 2.2. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2018	13
Tabel 2.3. Ringkasan Anggaran Program Tahun 2018	14
Tabel 2.4. Ringkasan Anggaran Kegiatan Tahun 2018.....	14
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung.....	16
Tabel 3.1. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran	17
Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja.....	18
Tabel 3.3. Realiasi kinerja Tahun Anggaran 2018.....	21
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	25
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan RPJMD.....	29
Tabel 3.6. Jumlah dan Realisasi Penggunaan Anggaran.....	30
Tabel 3.7. Target dan Realisasi Belanja Langsung	30

BAB I**Pendahuluan****1.1. Data Umum Organisasi****A. Tugas BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 68 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 nomor 68) dijelaskan dengan rinci bahwa BPKAD mempunyai tugas pokok dan dibantu oleh bidang sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh organisasi badan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. BPKAD meliputi Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi.

B. Fungsi BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Untuk melaksanakan tugasnya maka BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset daerah ;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan dan aset daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara tipologi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tergolong kedalam Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu :

1. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan Administrasi kepada seluruh unik kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana Program dan Anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan Barang milik Daerah/kekayaan Negara, dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yang masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang anggaran meliputi: pengendalian anggaran, anggaran belanja langsung, dan anggaran belanja tidak langsung. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan dibidang anggaran;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang anggaran;

- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup pengendalian anggaran, anggaran belanja langsung, dan anggaran belanja tidak langsung;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian anggaran, anggaran belanja langsung, dan anggaran belanja tidak langsung; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Anggaran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
3. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung;

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan dibidang perbendaharaan;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang perbendaharaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Pelayanan Keuangan Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pelayanan Keuangan Daerah, Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Perbendaharaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-

masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Pelayanan Keuangan Daerah;
2. Sub Bidang Belanja Langsung;
3. Sub Bidang Belanja Tidak langsung;

4. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang aset meliputi : perencanaan dan penatausahaan aset, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset serta pemindahtanganan, penilaian dan penghapusan aset. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kerja dibidang Aset;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang Aset;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan penatausahaan Aset, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan Aset, serta pemindahtanganan, penilaian dan penghapusan Aset;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup perencanaan dan penatausahaan Aset, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan Aset serta pemindahtanganan, penilaian dan penghapusan Aset; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
3. Sub Bidang Pemindahtanganan, Penilaian dan Penghapusan;

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang aset meliputi : akuntansi dan pelaporan keuangan, penatausahaan keuangan, dan dokumentasi dan informasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang akuntansi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis lingkup akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, penatausahaan keuangan Daerah, dan dokumentasi dan informasi keuangan Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, penatausahaan keuangan Daerah, dan dokumentasi dan informasi keuangan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Akuntansi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, yaitu :

1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan;
2. Subbidang Penatausahaan Keuangan;
3. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Keuangan.

Selanjutnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana terlampir (Lampiran 1).

Aspek lain yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah pentingnya menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel. Sehingga diharapkan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap bisa

memwujudkan Opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah. Opini WTP adalah sebuah penilaian tentang informasi kewajaran pada laporan keuangan pemerintah yang diperiksa oleh BPK. Kreteria dalam pemeriksaan tersebut antara lain Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektifitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan pada perundang-undangan. Prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya manajemen aset daerah/ barang milik daerah ditingkatkan kinerjanya dan harus menjadi hal yang sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan dari bidang aset lambat atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD sehingga Aset Daerah merupakan hal penting yang melengkapi penyusunan LKPD atau laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.

1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut ini akan dijelaskan sumber daya yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 40 (empat puluh) orang yang semuanya PNS dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam namun sebagian besar adalah Sarjana Ekonomi. Sistem Kerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuntut pekerjaan dilakukan dengan cepat, cermat dan akurat, karena perangkat daerah ini memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan hasil rencana serta dokumen penunjang lainnya harus dibuat dengan se-detail mungkin guna menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan aset daerah. Untuk mencapai tujuan organisasi maka seluruh komponen organisasi diarahkan untuk berperan serta secara aktif dalam membangun sistem yang solid, implementasinya adalah selalu bekerjasama dalam tim sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, tidak mewakili kepentingan orang per orang tapi yang muncul adalah kebijakan yang berasal dari hasil musyawarah tim yang di dasarkan pada peraturan yang berlaku. Manajemen kerja yang efisien, efektif waktu dan responsif sampai saat ini mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang cukup membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal yang masih harus dilengkapi dan diperbaiki dari segi Sumber Daya Manusia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah perlunya disiapkan pemimpin-pemimpin yang lebih mengerti dan piawai dalam memahami liku-liku birokrasi, hal ini berlaku bagi mereka yang menduduki eselonering dari eselon 4 sampai dengan eselon 2. Hal ini sangat penting sekali mengingat sebagai instansi yang vital, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam waktu yang cepat. Bila pemimpin-pemimpin dibekali dengan teknik perumusan strategi yang baik dalam hal pengambilan keputusan di lingkup birokrasi, tentunya hal ini menjadi

nilai plus bagi organisasi karena setiap kali dibutuhkan di saat kapanpun, mampu menghasilkan sebuah keputusan atau kebijakan yang berkualitas dan mempunyai jangkauan yang luas serta tidak memiliki resiko hukum karena kebijakan yang diambil sudah dipertimbangkan secara matang dan terukur dengan baik.

Berikut ini data PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diklasifikasikan berdasarkan golongan sebagaimana **Tabel 1.1.** dan tingkat pendidikan sebagaimana **Tabel 1.2.** berikut :

Tabel 1.1.
PNS pada BPKAD berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	0	0	0
2	II	3	6	9
3	III	26	2	28
4	IV	4	0	4
Jumlah		33	8	41

Berdasarkan tabel 2.1 diatas terlihat jumlah paling besar adalah Golongan IV berjumlah 4 Orang Golongan III berjumlah 28 Orang dan Golongan II berjumlah 9 Orang.

Tabel 1.2.
PNS pada BPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	0	0	0
2	SLTP	0	0	0
3	SLTA	6	5	11
4	D-3	2	3	5
5	D-4	2	0	2
6	S-1	16	6	22
7	S-2	1	0	1
Jumlah		27	14	41

Berdasarkan tabel Tabel 2.2 diatas terlihat jumlah paling besar adalah golongan pendidikan S.1 berjumlah 22 Orang yang kemudian diikuti golongan SLTA berjumlah 11 Orang, D.3 berjumlah 5 Orang, D.4 berjumlah 2 orang dan S2 1 Orang.

Selain PNS, tugas-tugas keseharian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga dibantu oleh beberapa orang Tenaga Non PNS yang bertugas dan ditempatkan pada tiap-tiap unit kerja. Tingginya beban pekerjaan, cepatnya ritme kerja dan kompleksnya permasalahan yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memerlukan bantuan Tenaga Non PNS dalam rangka mengatasi kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk mendukung sistem kerja agar tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilaksanakan dengan baik serta menghasilkan output pekerjaan yang tepat waktu dan berkualitas.

2. Sarana dan Prasarana

Dikarenakan keterbatasan gedung kantor yang representatif, pada awal pembentukan dan beroperasinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, organisasi ini menempati Lantai 2 gedung Kantor Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jl. Jend. Sudirman No. 182 Kuala Tungkal sesuai dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 67/Kep.BUP/BPKAD/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Keputusan terlampir (Lampiran.2).

Selain itu guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat difasilitasi pula dengan Inventarisasi Kantor sebagaimana terlampir. (Lampiran 3).

1.1. Isu Strategis

Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Mekanisme system Pengelolaan Keuangan Daerah telah tertata dan terintegrasi dalam satu system yang terpadu dari mulai perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan/pertanggungjawaban, sebagai usaha pengelolaan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
- Perkembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terus dilakukan sejalan kebutuhan dan dalam rangka percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memacu kapasitas aparatur pengelola keuangan yang terus meningkat dan diwujudkan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implentasi Transaksi Non Tunai Pada pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, maka wajib untuk menyusun rencana aksi dan penyiapan infrastruktur termasuk regulasi sebagai dasar/pedoman pelaksanaan kebijakan.
- Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah serta aturan teknis yang dituangkan dalam peraturan menteri dalam negeri no 64 tahun 2013 dan Peraturan bupati nomor 32 tahun 2016.tentang kebijakan Akutansi berbasis Akrual dengan Penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 telah mengacu pada format sesuai peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Dengan LHP Nomor : 10.A/LHP/XVIII.JMB/2018 Tanggal 28 Mei 2018.

1.4. Sistematika Laporan.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Data Umum Organisasi.
- 1.2. Aspek Strategis Organisasi.
- 1.3. Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.4. Sistematika Penulisan.

Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta sistem garis besar isi dokumen.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP**LAMPIRAN**

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

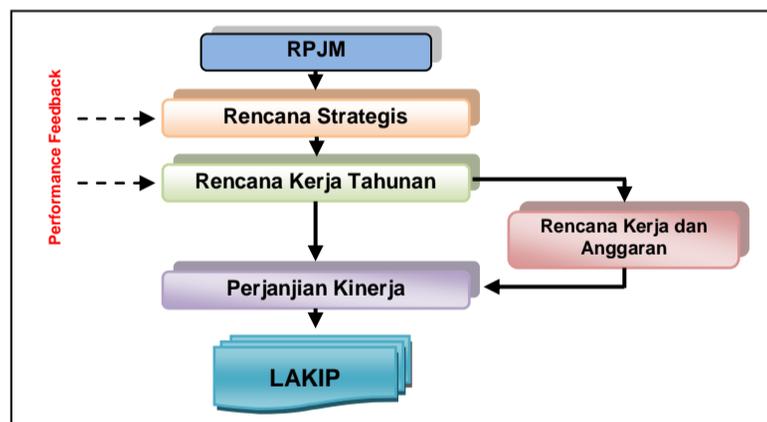
2.1. Perencanaan Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusunlah suatu perencanaan sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka mempertanggung jawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Komponen SAKIP terdiri dari : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Adapun dokumen-dokumen dalam penyelenggaraan SAKIP adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Dokumen SAKIP



Sebagai satuan kerja perangkat daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Renstra mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, dimana tugas pokok BPKAD berkaitan pada Misi IV Bupati Tanjung Jabung Barat yang berbunyi “Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui Harmonisasi

Kehidupan Beragama dan Berbudaya, Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dengan sasaran peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis e-government dan e-budgeting. Dengan sasaran peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis e-government dan e-budgeting dan indikator perencanaan secara online dan transparan. Dalam pelaksanaannya terdapat dalam DPA BPKAD dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya tergambar dalam perjanjian kinerja tahunan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan organisasi dalam periode waktu satu tahun. Adapun Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir.

Tabel 2.2
 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya	Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (rata-rata)	12 Bulan
2.	Peningkatan Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana aparatur	Presentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna perangkat daerah	64%
3.	Peningkatan kompetensi SDM sesuai diklat teknis bagi ASN di BPKAD	Meningkatnya disiplin aparatur	85%
4.	Peningkatan wawasan dan keterampilan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi dan kapasitas	Meningkatnya kompetensi ASN	75%
5.	Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya nilai AKIP BPKAD	B
6.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu
		Kelancaran Pelayanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	12 Bulan
		Tersusunnya Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Tepat Waktu	1 Dokumen
		Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat	1 Dokumen

Tabel 2.3
Ringkasan Anggaran Program Tahun 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.412.790.653,00	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 248.400.000,00	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 45.325.000,00	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 50.000.000,00	
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 58.000.000,00	
6.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 8.113.894.100,00	
Jumlah		Rp. 10.928.409.753,00	

Tabel 2.4
Ringkasan Anggaran Kegiatan Tahun 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan	Anggaran
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.412.790.653
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.295.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	109.620.000
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	391.960.000
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.413.190
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	185.490.100
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.220.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.477.363
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	19.200.000
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	66.000.000
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.017.115.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	248.400.000
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	27.000.000
13	Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	159.400.000
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.325.000
16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45.325.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000
17	Pengembangan SDM	50.000.000

V		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58.000.000
	18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	58.000.000
VI		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.113.894.100
	19	Revisi Analisa Standar Belanja	40.430.000
	20	Penyusunan Standar Satuan Harga	47.650.000
	21	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	1.528.109.250
	22	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	310.690.000
	23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	224.225.000
	24	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	209.292.500
	25	Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	383.495.000
	26	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	120.375.000
	27	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah	154.500.000
	28	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	127.000.000
	29	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	134.979.750
	30	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	33.341.120
	31	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	85.920.000
	32	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	223.615.000
	33	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	93.152.500
	34	Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	114.977.000
	35	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	265.230.980
	36	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	2.031.100.000
	37	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	143.250.000
	38	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	
	39	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	260.320.000
	40	Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	113.512.500
	41	Penatausahaan Penerimaan	76.500.000
	42	Penatausahaan Belanja	75.450.000
	43	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	196.535.000
	44	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	516.400.000
	45	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	64.650.000
	46	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	65.230.000

47	Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	131.250.000
48	Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjab Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	93.707.500
49	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	85.125.000
50	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	86.081.000
51	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	77.800.000

Anggaran belanja langsung tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah APBD Perubahan atau per 31 Desember 2018 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Uraian	Anggaran		Realisasi		
	Jumlah	Proporsi	Keuangan		Fisik (%)
			Keuangan	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.039.115.653	18,56	2.024.811.717	99,30	99,61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	493.600.000	4,49	431.602.285	87,44	97,78
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45.325.000	0,41	44.082.500	97,26	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	0,68	65.342.600	87,12	87,12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58.000.000	0,53	57.625.000	99,35	99,35
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.278.095.620	75,33	7.650.044.840	92,41	95,32
Jumlah 2018	10.989.136.273	100,00	10.273.508.942	93,49	96,21

Penetapan Kinerja yang dibuat awal tahun 2018 telah ditetapkan dalam DPA tahun 2018 antara Kepala BPKAD sebagai PIHAK PERTAMA sebagai penerima amanah dengan Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai PIHAK KEDUA selaku Pemberi Amanah, yang telah ditandatangani oleh kedua pihak dan antara Kepala BPKAD sebagaimana (terlampir).

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Dalam mencapai visi dan melaksanakan misinya Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya untuk meujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan dikabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan melalui pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran diukur dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode pengukuran dan penyimpulan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode pengukuran capaian kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing Indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel .3.1

Metode penyimpulan capaian Sasaran :

No	Kriteria Pengukuran	Predikat
1	X > 100%	Sangat Baik
2	85% X < 100%	Baik
3	60% X < 85%	Cukup Baik
4	X < 60%	Kurang Baik

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja BPKAD Tahun 2018.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian sasaran “Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah yang efektif efisien ekonomis transparan dan akuntabel yang dilaksanakan BPKAD Tanjung Jabung Barat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Tahun 2018		
				realisasi kinerja	capaian kinerja	predikat capaian
1	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	1 Ketepatan waktu penetapan APBD (paling lambat akhir Desember	Tepat waktu	tepat waktu	1,00	Baik
		2 Kelancaran pelayanan belanja tidak langsung dan belanja langsung	12 bulan	12 bukan	100	Baik
		3 Tersusunnya Laporan Keuangan yg berkualitas dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokume	100,00%	Baik
		4 Tersedianya data Barang Milik Daerah yang Akurat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Baik

Uraian Capaian Indikator kinerja diatas dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penetapan APBD.

Ketepatan waktu penetapan APBD (paling lambat akhir Desember) dimana dalam pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 dengan uraian sebagai berikut :

1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Dearah dengan kebijakan Pemerintah
2. Prinsip penyusunan APBD
3. Kebijakan penyusunan APBD
4. Teknik Penyusunan APBD.

Dalam penyusunan APBD tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2019 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2019.

Pada tabel 5 Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Nomor 12 menyatakan Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember). Dalam pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah melaksanakan target kinerja ketepatan waktu dengan hasil 100%. Dasar Indikator telah ditetapkan Perda Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Lembaran Dearah Nomor 18 Nomor Registrasi Nomor 18 tanggal 26 Desember 2018. Dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 49 Tahun Anggaran 2019 berita Daerah Nomor 51 tanggal 26 Desember 2018.

2. Kelancaran Pelayanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Dalam pelaksanaan kinerja Belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun 2018 Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah telah menerima SPM berjumlah 6878 berkas dan mengeluarkan 6878

transaksi pengeluaran SP2D. Dengan demikian target kinerja dengan hasil 100%.

Terkait dengan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna meminimalisir adanya tindakan yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, maka BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah membuat Intruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai di daerah.

3. Tersusunnya Laporan Keuangan yang berkualitas dan tepat waktu

Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan kepada DPRD selambat lambatnya 6 bulan setelah tahun Anggaran berakhir, Laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2017 pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat disampaikan ke DPR tanggal 25 Juni 2018 dengan surat Nomor : 900/1595/BPKAD/2018. Dan hasilnya peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 dan ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2018. Dengan demikian penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu dengan nilai 100%.

4. Tersusunnya Data Barang Milik Daerah Yang Akurat

Data Barang Milik Daerah terdiri dari :

- a. Aset Tetap Rp. 4.201.442.347.274,63
- b. Aset Lainnya Rp. 198.825.588.766,69

Sedangkan Neraca Aset pada pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017 Rp.3.088.779.263.847,17 terjadi penyusutan senilai Rp.1.112.663.088.427,46 atau (26,48%). Sedangkan aset lainnya berjumlah Rp.129.614.824.532,63 terjadi penyusutan senilai Rp.69.210.764.234,06 atau (34,81%).

Selain Indikator kinerja diatas terdapat indikator kinerja RPJMD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKAD kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. dengan catatan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2017	Target 2020	Capaian Kinerja 2018	Predikat Capaian
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	100%	Baik

Capaian Indikator kinerja pada tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat predikat WDP terhadap LHP 2017 dan mencapai target akhir tahun restra yaitu WTP.

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Tabel 3.3

Realiasi kinerja Tahun Anggaran 2018

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018			KET
			TARGET	REALISASI	TINGKAT REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata – rata)	2.039.115.653	2.024.811.717	99,30	
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.295.000	2.041.600	88,96	
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	0,00	
01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	35.770.000	34.860.400	97,46	
01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	391.960.000	391.960.000	100,00	
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.413.190	3.298.600	96,64	
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	185.490.100	180.392.850	97,25	
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.200.000	20.537.250	96,87	
01	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.477.363	2.669.100	76,76	

01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/ Koran	19.200.000	15.858.000	82,59	
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	66.000.000	63.184.800	95,73	
01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas secara efektif dan efisien				
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana laya guna Perangkat daerah	493.600.000	431.602.285	87,44	
02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Untuk Gedung Kantor	27.000.000	21.939.000	81,26	
02	12	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	262.400.000	224.566.875	85,58	
02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	164.200.000	148.591.410	90,49	
02	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	40.000.000	36.505.000	91,26	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	45.325.000	44.082.500	97,26	
03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	45.325.000	44.082.500	97,26	
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi ASN	75.000.000	65.342.600	87,12	
05	05	Pengembangan SDM	Terlaksananya Pengembangan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur PNS	75.000.000	65.342.600	87,12	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"	58.000.000	57.625.000	99,35	
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	58.000.000	57.625.000	99,35	
33		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD 2. Kelancaran Pelayanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 3. Tersusunnya Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Tepat Waktu 4. Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat	8.278.095.620	7.650.044.840	92,41	
33	01	Revisi Analisa Standar Belanja	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja	-	-	0,00	
33	02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Satuan Harga	47.650.000	45.666.250	95,84	

33	04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah	1.559.609.250	1.519.588.750	97,43	
33	05	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	310.690.000	268.958.500	86,57	
33	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	224.225.000	207.449.000	92,52	
33	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	234.597.500	228.625.250	97,45	
33	10	Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aset/Barang Daerah	314.385.000	287.385.000	91,41	
33	21	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Kas	137.162.500	136.852.500	99,77	
33	23	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah	Efisiensi Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	154.500.000	151.500.000	98,06	
33	24	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	127.000.000	82.610.000	65,05	
33	25	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Pemberian Belanja Tidak Langsung PPKD	134.979.750	131.545.000	97,46	
33	26	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Tercapainya Informasi tentang Pedoman Penyusunan APBD	33.341.120	27.031.120	81,07	
33	27	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	85.920.000	71.310.000	83,00	
33	28	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	167.615.000	148.625.000	88,67	
33	29	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	Tersedianya SPD seluruh SKPD	93.152.500	91.414.500	98,13	
33	30	Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan Komunikasi Keuangan Menjadi Lancar • Termonitornya Jaringan yang Terkoneksi • Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Jaringan di SKPD 	114.977.000	98.137.000	85,35	

33	31	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	Terciptanya Informasi Keuangan Daerah berupa Daftar Gaji/ Pemeliharaan Simda Gaji dan TKD	244.000.000	237.840.000	97,48	
33	32	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Terciptanya Pelayanan Penatausahaan Keuangan	1.907.100.000	1.854.654.000	97,25	
33	33	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terciptanya Informasi Keuangan Daerah	143.200.000	138.350.000	96,61	
33	34	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlatihnya Keuangan Unit Kerja	77.160.000	56.094.600	72,70	
33	36	Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	Terciptanya Pengelolaan Keuangan yang maksimal	135.512.500	135.212.500	99,78	
33	37	Penatausahaan Penerimaan	Terlaksananya Penatausahaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	76.500.000	68.928.000	90,10	
33	38	Penatausahaan Belanja	Terlaksananya Penatausahaan Belanja yang Efisien	75.450.000	68.172.000	90,35	
33	39	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	654.455.000	446.221.000	68,18	
33	40	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	567.100.000	523.351.620	92,29	
33	41	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	64.650.000	59.513.250	92,05	
33	42	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	65.230.000	57.950.000	88,84	
33	43	Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terciptanya Pengeluaran Belanja Langsung yang efektif dan efisien	131.250.000	130.860.000	99,70	
33	44	Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjab Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	Terkendalinya Anggaran Kas dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	93.707.500	91.897.500	98,07	
33	45	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	85.125.000	82.425.000	96,83	
33	46	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Terlaksananya Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya bagi PNS Kab. Tanjab Barat	86.081.000	83.000.000	96,42	

33	69	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	Terlaksananya Penyusunan Renja SKPD	77.800.000	73.720.000	94,76	
33	85	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersusnya Buku Analisa Standar Belanja	53.970.000	45.157.500	83,67	
Jumlah				10.989.136.273	10.273.508.942	93,49	

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2018.

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2017 dengan Tahun 2018

KODE	URUSAN/BID. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN				KET
			2017		2018		
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata – rata)	1.288.854.253	92,11	2.024.811.717	99,30	
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran Administrasi Surat Menyurat	2.1.93.000	95,56	2.041.600	88,96	
01	02 Penyediaan jasa Koneksi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Tersedianya jasa Koneksi Sumber Daya dan Listrik	594.000.000	99,00	-		-Pindah kominfo
01	04 Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan		-		34.860.400	97,46	
01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kelancaran Administrasi Keuangan	249.270.000	92,83	391.960.000	100,00	
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.913.000	58,50	3.298.600	96,64	
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	197.592.525	92,09	180.392.850	97,25	
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	11.755.000	97,88	20.537.250	96,87	
01	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komopenerangan kantor	3.921.950	71,79	2.669.100	76,76	
01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan/ Koran	29.710.000	60,02	15.858.000	82,59	
01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	39.200.000	69,28	63.184.800	99,73	
01	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas secara efektif dan efisien	170.069.128	84,01	1.310.009.117	99,98	

02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layaguna Perangkat daerah	309.089.577	81,91	431.602.285	87,44
02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Untuk Gedung Kantor	-		21.939.000	81,26
02	12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya alat gedung kantor	215.017.000	95,95	224.566.875	85,58
02	22	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	66.987.996	57,72	148.591.410	90,49
02	26	Pemeliharaan Rutin /Ber kal a peralatan gedung kantor	Terpeliharanya pera latan gedung kantor Dalam kondisi baik	27.084.581	72,81	36.505.000	91,26
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	53.505.000	86,86	44.082.500	97,26
03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	53.505.000	86,86	44.082.500	97,26
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensiASN	9.000.000	45,00	65.342.600	87,12
05	05	Pengembangan SDM	Terlaksananya Pengembangan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Aparatur PNS	9.000.000	45,00	65.342.600	87,12
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP "B"	95.362.500	45,00	57.625.000	99,35
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95.362.500	45,00	57.625.000	99,35
06	021	Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas	Tersusunnya Renja	32.700.000	94,78	73.720.000	94,76
33		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD 2. Kelancaran Pelayanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 3. Tersusunnya Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Tepat Waktu 4. Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat	7.981.930.384	79,06	7.650.044.840	93,49
33	001	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja	53.240.000	66,71	45.666.250	95,84
33	002	Penyusunan Standar Satuan Harga	Buku Standar Satuan Harga	38.390.000	91,62	45.666.250	95,84
33	006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah	1.260.676.950	73,10	1.519.588.750	97,43

33	007	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	365.664.100	88,05	268.958.500	86,57
33	008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	228.174.000	77,77	207.449.000	92,52
33	009	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	214.481.370	85,71	228.625.250	97,45
33	016	Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Aset/Barang Daerah	197.386.750	66,83	287.385.000	91,41
33	021	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Buku Inventaris SKPD dan Kabupaten	151.032.475	70,59		
33	028	Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Kas	137.767.610	91,43	136.862.500	99,77
33	030	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah	Efisiensi Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	268.940.000	91,91	151.500.000	98,06
33	034	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Daftar Barang Milik Daerah	51.163.850	72,27	82.610.000	65,05
33	035	Penyusunan Pelaporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Laporan Realisasi Anggaran Dana TP dan UB	27.145.000	22,77		
33	036	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung PPKD	Pemberian Belanja Tidak Langsung PPKD	136.737.935	74,02	131.345.000	97,46
33	043	Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	Tercapainya Informasi tentang Pedoman Penyusunan APBD	25.618.650	54,69	27.031.120	81,07
33	045	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran	92.438.830	75,96	71.310.000	83,00
33	046	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	137.589.750	63,29	148.625.000	88,67
33	048	Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah	Informasi dan Data Transaksi Keuangan Daerah	103.716.480	92,77	-	
33	050	Penerbitan dan Pengendalian Surat Penyediaan Dana (SPD)	Tersedianya SPD seluruh SKPD	101.784.100	94,85	91.414.500	98,13
33	051	Penatausahaan dan Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Daerah	Dokumen Keuangan Daerah Tersiapkan secara Elektronik	53.450.000	96,83		

33	053	Peningkatan Penataan Jaringan Komunikasi Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan Komunikasi Keuangan Menjadi Lancar Termonitornya Jaringan yang Terkoneksi Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Jaringan di SKPD 	90.259.814	61,04	98.137.000	85,35
33	056	Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan Lainnya	Terciptanya Informasi Keuangan Daerah berupa Daftar Gaji/ Pemeliharaan Simda Gaji dan TKD	237.405.410		237.840.00	97,48
33	057	Peningkatan Pelayanan Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah	Terciptanya Pelayanan Penatausahaan Keuangan	1.724.251.064	80,25	1.854.654.000	97,25
33	058	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Belanja Langsung Keuangan Daerah	Terciptanya Informasi Keuangan Daerah	152.261.728	87,73	138.350.000	96,61
33	059	Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlatihnya Keuangan Unit Kerja	70.11.387	71,41	56.094.600	72,70
33	060	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah	98.256.047	92,78		
33	061	Pengelolaan dan penatausahaan realisasi keuangan DAU dan DAK	Terciptanya Pengelolaan Keuangan yang maksimal	127.410.310	94,87	135.212.500	99,78
33	062	Pelaksana Pelaporan Akuntansi Pendapatan dan Belanja	Terlaksananya Sistem Akuntansi Pemerintah	106.155.895	80,09		
33	064	Penatausahaan Penerimaan	Terlaksananya Penatausahaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	67.702.415	76,72	68.928.000	90,10
33	065	Penatausahaan Belanja	Terlaksananya Penatausahaan Belanja yang Efisien	67.270.000	76,88	68.172.000	90,35
33	066	Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	143.156.300	73,62	446.221.000	68,18
33	067	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	877.909.500	88,77	523.351.620	92,29
33	068	Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Laporan Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	90.804.600	85,38	59.513.250	92,05
33	069	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	100.367.042	84,13	57.950.000	88,84

33	070	Evaluasi Pencapaian Kinerja Belanja Langsung Keuangan Daerah	TPengeluaran Belanja Langsung yang efektif dan efisien	95.005.137	66,58	130.860.000	99,70	
33	071	Penyusunan Anggaran Kas Pemkab Tanjab Barat dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	Terkendalnya Anggaran Kas dan Alokasi Triwulan Belanja SKPD	92.652.500	94,86	91.897.500	98,07	
33	075	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung	83.794.600	89,03	82.425.000	96,83	
33	076	Perencanaan dan Penyusunan Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS	Terlaksananya Belanja Gaji dan Tunjangan lainnya bagi PNS Kab. Tanjab Barat	111.758.785	91,70	83.000.000	96,42	
Jumlah				9.737.471.714	80,76	10.273.508.942	93,49	

3.1.3. Perbandingan Realisasi kinerja dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Keuangan									
2.1	Akreditasi Opini BPK	LHP	Disclaimer	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.6.
Jumlah dan Realisasi Penggunaan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018

Uraian	Anggaran		Realisasi		
	Jumlah	Proporsi	Keuangan		Fisik (%)
Keuangan			%		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,039,115,653	18.56	2,024,811,717	99.30	99.61
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	493,600,000	4.49	431,602,285	87.44	97.78
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45,325,000	0.41	44,082,500	97.26	100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75,000,000	0.68	65,342,600	87.12	87.12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,000,000	0.53	57,625,000	99.35	99.35
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8,278,095,620	75.33	7,650,044,840	92.41	95.32
Jumlah 2018	10,989,136,273	100.00	10,273,508,942	93.49	96.21
Jumlah 2017	12,057,907,384	100.00	9,737,471,714	80.76	84.06

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Belanja Langsung
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Uraian	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	3,691,460,000	3,621,535,000	98.11
2	Belanja Barang dan Jasa	6,569,932,273	6,068,337,067	92.37
3	Belanja Modal	727,744,000	583,636,875	80.20
JUMLAH		10,989,136,273	10,273,508,942	93.49

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pada tahun 2018 BPKAD KabupatenTanjung Jabung Barat dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Capaian lebih dari 100% (Sangat Baik)
- 2) Capaian 75% sampai 100% (Baik)
- 3) Capaian 55% sampa i74% (Cukup)
- 4) Capaian kurang dari 54% (Kurang)

Secara keseluruhan capaian kinerja 100% Kategori (Baik).

Pembiayaan program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Rp.10.989.136.273,- terealisasi Rp. 10.273.508.942,- dengan penyerapan sebesar 93.49% atau efisiensi sebesar 6,51%.

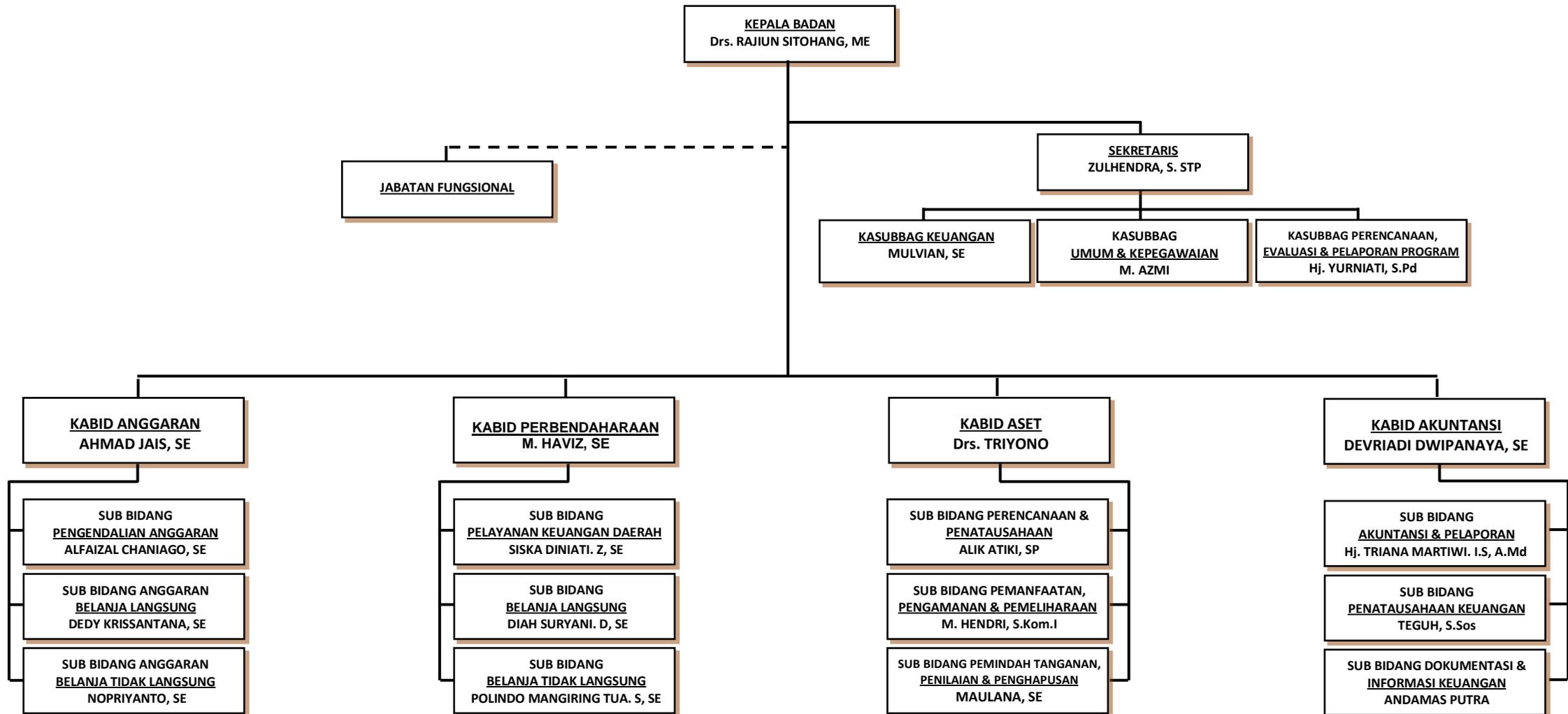
4.2. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, fungsi BPKAD melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah,ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum,antara lain :

- a. Meningkatkan rapat koordinasi secara berkala;
- b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja secara berkala;
- c. meningkatkan pemenuhan sarana informasi kepada publik lewat media informasi online.

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**





BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 67 /Kep. BUP/BPKAD/2017

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Organisasi Perangkat Daerah Baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah perlu penataan ulang penggunaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang Sementara sebagaimana pada Diktum KESATU berkewajiban :
- a. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan sementara;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang digunakan sementara; dan
 - c. menyerahkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang setelah jangka waktu penggunaan sementara berakhir.
- KETIGA** : Jangka waktu penggunaan sementara Barang Milik Daerah selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



SAFRIAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNGPURA BARAT
NOMOR : 61 /Kep. BUP/BPKAD/2017
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNGPURA BARAT

DAFTAR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SEMENTARA TANAH, GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNGPURA BARAT

NO	NAMA BARANG	LUAS (M ²)	TAHUN	LETAK OBJEK	ASAL USUL	HARGA PEROLEHAN	PERUNTUKAN	SKPD PENGGUNA BARANG	SKPD PENGGUNA BARANG SEMENTARA	KETERANGAN
1	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	29,275	2002	JL. BERINGIN KUALA TUNGKAL KEC. TUNGKAL ILIR	APBD	5,855,000,000	KANTOR	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH	LUAS TANAH 1,887 M ²
							KANTOR		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	LUAS TANAH 596,6 M ²
							KANTOR		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	LUAS TANAH 1,366,8 M ²
							KANTOR		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	LUAS TANAH 1,000 M ²
							KANTOR		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	LUAS TANAH 1,088 M ²
							KANTOR		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	LUAS TANAH 500 M ²
2	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	62,742	2002	JL. SRI SOEDEWI MS PARIT GOMPONG PEMBENGIS KEC. BRAM ITAM	APBD	6,622,480,000	KANTOR	SEKRETARIAT DPRD	DINAS PARWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	LUAS TANAH 4,037 M ²
							KANTOR		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	LUAS TANAH 9,419 M ²

NO	NAMA BARANG	LUAS (M ²)	TAHUN	LETAK OBJEK	ASAL USUL	HARGA PEROLEHAN	PERUNTUKAN	SKPD PENGGUNA BARANG	SKPD PENGGUNA BARANG SEMENTARA	KETERANGAN
3	TANAH BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH	4,762	1982	JL. PIERRE TENDREAN KUALA TUNGKAL KEC. TUNGKAL ILIR	HIBAH PUSAT	593,700,000	KANTOR	DINAS TENAGA KERJA	DINAS SOSIAL	LUAS TANAH 3,262 M ²
GEDUNG DAN BANGUNAN										
4	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	2,006	2012	JL. MAJID BRANGAS KUALA TUNGKAL KEC. TUNGKAL ILIR	APBD	1,497,155,600	GEDUNG KANTOR	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	LUAS BANGUNAN 2,006 M ²
5	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	3,690	2002	JL. JENDERAL SUDIRMAN KUALA TUNGKAL KEC. TUNGKAL ILIR	APBD	5,667,200,000	GEDUNG KANTOR	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	LUAS BANGUNAN 340 M ²
6	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	2,833	2002	JL. SRI SOEDEWI MS PARIT GOMFONG KEC. BRAM ITAM	APBD	2,833,600,000	GEDUNG KANTOR	SEKRETARIAT DPRD	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	LUAS BANGUNAN 767 M ²
							GEDUNG KANTOR		DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	LUAS BANGUNAN 1,766 M ²

BUPATI TANJUNGPINANG BARAT.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. RAJIUN SITOHANG, ME**

Jabatan : KEPALA BPKAD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. SAFRIAL. MS**

Jabatan : BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

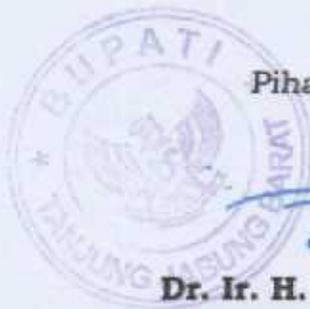
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal,

2018



Pihak Kedua

Dr. Ir. H. SAFRIAL. MS



Pihak Pertama

Drs. RAJIUN SITOHANG, ME



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Program/Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya.	Berjalannya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar (Rata - rata)	12 Bulan
2.	Peningkatan kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana dan prasarana aparatur.	Persentase kecukupan sarana dan prasarana layak guna Perangkat daerah	64%
3.	Peningkatan kompetensi SDM sesuai diklat teknis bagi ASN di BPKAD	Meningkatnya disiplin aparatur	85%
4.	Peningkatan wawasan dan keterampilan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi dan kapasitas	Meningkatnya kompetensi ASN	75%
5.	Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.	Meningkatnya nilai AKIP BPKAD	B
6.	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP
		Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu
		Kelancaran Pelayanan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	12 Bulan
		Tersusunnya Laporan Keuangan yang Berkualitas dan Tepat Waktu	1 Dokumen
		Tersedianya Data Barang Milik Daerah yang Akurat	1 Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 182 Telp.(0742)

Fax.

KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.412.790.653,00	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 248.400.000,00	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 45.325.000,00	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 50.000.000,00	
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 58.000.000,00	
6.	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 8.113.894.100,00	
Jumlah		Rp. 10.928.409.753,00	

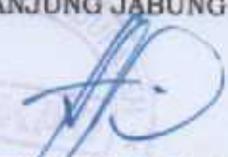
Kuala Tungkal,

2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. RAJIUN SITOANG, ME

Pembina Tk. I

NIP. 19611120 199203 1 001